

EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA TANJUNG LIPAT KABUPATEN LINGGA

1). RIAU SUJARWANI

2). SUHANDRI

1). Dosen Program Studi Administrasi Publik

2). Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik

Email: riau_sujarwani@gmail.com

Abstract

One of the development problems is poverty, poverty is marked by the inability to meet needs, one of which is housing needs, the need for decent housing is a concern for the central government and local governments. In this case, Lingga Regency, Riau Islands Province, received assistance to rehabilitate 80 uninhabitable housing units from the Ministry of Social Affairs (Kemensos) through the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RUTILAHU). In implementing this program, the problems that arise in the community in Tanjung Fold Village, Bakung Serumpun Sub-district, Lingga Regency, namely: the community does not realize that the RS-RUTILAHU program only wants to ease the burden on the community in building houses that are livable, and the construction of houses is not on time. has been determined, then there are also recipients who do not deserve assistance but receive assistance.

The purpose of this study was to evaluate the Social Rehabilitation Assistance Program for Uninhabitable Houses in Tanjung Fold Village, Lingga Regency. This research is descriptive qualitative. The population in this study is the community element as the main recipient of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Homes in Tanjung Fold Village as many as 10 units as well as Key Informants Assisting recipients of assistance, Tanjung Fold Village Head, and employees at the Lingga Regency Social Service. The sampling technique is the purposive sampling technique. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques using observation, and interviews. The data analysis technique is qualitative data analysis.

The results of this study are that the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RUTILAHU) in the village of Tanjung Fold, Lingga Regency has achieved its main goal, namely to facilitate the poor for housing needs that are livable, but not maximized. Suggestions that can be given are monitoring and supervision in the implementation of assistant duties which must also be carried out by the Tanjung Fold Village which is responsible to the receiving community and also the Lingga Regency Social and Labor Agency.

Keywords: *Evaluation, Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses*

Abstrak

Salah satu permasalahan pembagunana adalah kemiskinan, kemiskinan di tandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya kebutuhan papan, kebutuhan layak hunian yang layak menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau mendapat bantuan rehab 80 unit rumah tidak layak huni dari Kementrian Soisal (Kemensos) melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU). Dalam penyelenggaraan program ini masalah yang muncul pada masyarakat di Desa

Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga yaitu: masyarakat tidak menyadari bahwa program RS-RUTILAHU ini hanya ingin meringankan beban masyarakat dalam membangun rumah yang memang layak huni, dan dalam pengerjaan rumah tidak tepat waktu yang telah ditentukan, kemudian juga masih ada penerima yang tidak layak mendapat bantuan tetapi mendapatkan bantuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah unsur masyarakat sebagai penerima utama dari Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat sebanyak 10 unit serta *Key Informan* Pendamping penerima bantuan, Kepala Desa Tanjung Lipat, serta pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Lingga. Teknik Pengambilan sampel yaitu teknik *Purposive Sampel*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan wawancara. Teknik analisa datanya yaitu analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di desa tanjung lipat kabupaten lingga telah mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk memfasilitasi masyarakat miskin akan kebutuhan rumah yang layak huni, namun belum maksimal. Saran yang dapat diberikan yaitu Monitoring maupun pengawasan didalam pelaksanaan tugas pendamping yang juga harus dilakukan oleh pihak Desa Tanjung Lipat yang bertanggung jawab kepada masyarakat penerima dan juga Dinsosnaker Kabupaten Lingga.

Kata kunci: Evaluasi, Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pembagunana adalah kemiskinan, kemiskinan di tandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan salah satunya kebutuhan papan, kebutuhan layak hunian yang layak menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan dan mengembangkan program bantuan guna membantu masyarakat dalam meringankan beban sosial yang ada dan dirasakan oleh masyarakat berpenghasialn menengah kebawah. Berbagai upaya dan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Desa tanjung lipat adalah salah satu desa yang ada dikawasan Indonesia, yang kesadaran masyarakat akan kualitas kehidupan dan penghidupan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hunian yang layak hingga kepada menjaga lingkungan sekitar menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, untuk menyelesaikan masalah permukiman masyarakat yang ada dalam pembagunan dan menjadi rumah layak huni bagi masyarakat lingga yang bersih dan

terlindungi. Dalam pelaksanaan program RS-RUTILAHU ini waktu yang ditentukan menggunakan waktu 100 hari kelender setelah dana masuk ke rekening kelompok, dalam satu unit rumah tidak layak huni.

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau mendapat bantuan rehab 80 unit rumah tidak layak huni dari Kementrian Soisal (Kemensos) melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU). Untuk tahun 2019 di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga telah mendapatkan sebanyak 10 penerima dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. dalam penyelenggaraan program ini maka masalah yang muncul pada publik atau masyarakat di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga yaitu : masyarakat tidak menyadari bahwa program RS-RUTILAHU ini hanya ingin meringankan beban masyarakat dalam membangun rumah yang memang layak huni, dan dalam pengerjaan rumah tidak tepat waktu yang telah ditentukan, kemudiaan juga masih ada penerima yang tidak layak mendapat bantuan tetapi mendapatkan bantuan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarmah Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang 2016 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, ditemukan masalah yang timbul: instansi-instansi pemerintah, Pemerintah Kota Batam dan Camat, Lurah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata, dalam hal ini bisa dikatakan kurang keseriusan untuk mengatasi demi keberhasilan kegiatan ini.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Fajar Nugraha Fakultas Ilmu Soail dan Politik Universits Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2014, Tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Dalam penelitian tersebut ditemukan masalah masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas yaitu masyarakat mengenai program RS-RTLH, seperti ketidaktahuannya terhadap siapa saja yang bertanggung jawab dengan program tersebut. Kenerja dari Dinas sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meltesa Rapita Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Isalam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019, Tentang Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian tersebut ditemukan masalah pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya berdasarkan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam adalah yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya, dan tim pelaksana belum memiliki jiwa peduli pada sesama serta masyarakat yang belum mengutamakan sikap saling membantu sehingga tidak adanya prinsip solidaritas sosial yang diterapkan.

Mengingat penyelesaian masalah kemiskinan, terutama permasalahan hunian merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, maka penelitian mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan

Menurut William N. Dunn (Winarno :2012) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalisasi, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R. Dye (Santosa 2009:28) mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai empat sifat : regulatif, organisasional, distributive, dan ekstratif. Kebijakan publik berkenaan pula dengan urusan pokok bagi negara, seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, penyediaan bahan pangan, pengembangan sistem politik, pembangunan kota dan daerah.

Kemudian Dye juga mengemukakan bahwa terdapat 6 proses pembuatan sebuah kebijakan beserta kegiatan didalamnya (2002:32), yakni :

- a. Identifikasi Masalah, yakni dengan mempublikasikan masalah-masalah sosial yang ada, mengekspresikan tuntutan-tuntutan untuk tindakan pemerintah.

- b. Agenda seting, yakni dengan memutuskan masalah apa yang akan di putuskan, masalah apa yang akan ditangani oleh pemerintah.
- c. Formulasi kebijakan yakni dengan mengembangkan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah-masalah yang ada.
- d. Legitimasi Kebijakan, yakni dengan memilih sebuah proposal/ masalah, megembangkan dukungan politik, memberlakukan menjadi sebuah hukum, dan menentukan konstitusionalitasnya.
- e. Implementasi Kebijakan, yakni dengan pengorganisasian departemen dan lembaga yang ada, serta menyediakan pembayaran atau jasa pengadaan pajak.
- f. Evaluasi Kebijakan, yakni dengan adanya laporan akhir dari program pemerintah, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan pada target dan kelompok non sasaran, serta mengusulkan perubahan dan perbaikan.

2. Evaluasi

Menurut Dun (Nugroho 2008:472), pengertian dan istilah evaluasi, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Suchman (Winarno 2007:230) mengemukakan ada 6 langkah dalam evaluasi kebijakan yakni :

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu kelompok.

Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program, dengan indikator sebagai berikut (Wirawan, 2011:89):

- a. Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program.
- b. Mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program.
- c. Menentukan *cost effectiveness*, *cost efficiency*, dan *cost benefit*.
- d. Menentukan keseluruhan pelaksanaan program.
- e. Menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai.
- f. Menentukan apakah klien mendapatkan manfaat dari program.
- g. Menentukan komponen mana yang paling efektif dalam program.
- h. Menentukan keluran yang tidak diantisipasi dari program.
- i. Menentukan *cost* dan *benefit* program
- j. Mengkomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan.
- k. Mengambil keputusan apakah program harus dihentikan, dikembangkan, atau dilaksanakan di tempat lain.

3. Program

Program merupakan sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan, apabila program ini dikaitkan langsung dengan evaluasi dengan program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, dan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan atau terus-menerus, dan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan dengan kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.

Menurut Arikunto (2004:32) sesuai bentuk kegiatannya, program dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Program Pemerosesan
Yaitu program kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (input) menjadi bahan hasil proses atau keluaran (output).
- b. Program Layanan
Yaitu sebuah satuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu, sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
- c. Program Umum

Merupakan program yang tidak memiliki ciri utama serta tidak memiliki ciri khusus seperti program pemrosesan ataupun program layanan.

4. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program (Wirawan, 2011:17) evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*Process Evaluation*), Evaluasi Manfaat (*Outcome Evaluation*) dan Evaluasi Akibat (*Impact Evaluation*).

Stufflebeam (Tayibnapi 2008:14) merumuskan bahwa evaluasi sebagai "Suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan". Stufflebeam merumuskan model evaluasi CIPP, yang membagi evaluasi menjadi 4 macam, (Wirawan, 2011:92) :

a. *Contact Evaluation to Serve Planning Decision*

Kontek evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program, evaluasi ini untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan? (what need to be done?) dengan waktu pelaksanaan yaitu sebelum program diterima dengan sistem perencanaan program.

b. *Input Evaluation, Structuring Decision*

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

c. *Process Evaluation, to Serve Implementing Decision*

Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Samapi sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus di revisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.

d. *Product Evaluation, to Serve Recycling Decision*

Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang telah dilakukan setelah program berjalan?

Ada beberapa model evaluasi salah satunya yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program ialah Model Evaluasi Sistem Analisis (*System Analyis Evaluation Model*) yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy (Wirawan, 2011:107) atau yang sering disebut *Management Evaluation Mode*. Dalam evaluasi ini memiliki 5 indikator diantaranya, yaitu:

1. Evaluasi Masukan (*Imput Evaluation*)

Evaluasi masukan dalam hal ini berkaitan untuk menjangar dan menganalisis serta menilai kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu program bantuan, sumber-sumber yang diperlukan oleh program, meliputi diantaranya tenaga, keuangan, dan sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program.

2. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Pada tahap evaluasi proses memfokuskan kepada pelaksanaan program yang telah dirancang guna menghasilkan suatu hasil akhir serta yang akan mempengaruhi *Impact* (dampak) yang dihasilkan dari suatu program bantuan. Dalam evaluasi proses ini bersinggungan langsung terhadap pelaksanaan program dari pengusulan calon penerima bantuan, penetapan calon penerima, hingga pelaksanaan program.

3. Evaluasi Keluaran (*Output Evaluation*)

Keluaran program merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program.

4. Evaluasi Akibat / Pengaruh (*Outcome Evaluation*)

Evaluasi akibat atau dampak adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, keterampilan, status, dan level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan / intervensi. Dalam hal ini berkaitan erat dengan akibat/manfaat yang dirasakan secara langsung setelah pelaksanaan program. Apakah dengan diadakanya program bantuan dengan basis perbaikan kualitas hunian ini bermanfaat bagi masyarakat yang mendapat bantuan.

5. Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*)

Impact atau dampak adalah perubahan yang diharapkan atau tidak diharapkan yang terjadi dalam pelaksanaan program, organisasi, masyarakat, atau sistem sebagai hasil dari aktivitas program dalam jangka panjang.

Oleh Stufflebeam (Sri Ambar Rinah: 2020) diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal ?
2. Apakah Staff yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
3. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal ?
4. Hambatan - hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah unsur masyarakat sebagai penerima utama dari Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat sebanyak 10 unit serta *Key Informan* Pendamping penerima bantuan, Kepala Desa Tanjung Lipat, serta pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Lingga. Teknik Pengambilan sampel yaitu teknik *Purposive Sampel*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan wawancara. Teknik analisa datanya yaitu analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga

1. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Evaluasi masukan dalam program RUTILAHU di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga dalam hal ini berkaitan langsung dengan masukan-masukan dalam merancang sebuah program bantuan yang dapat dilihat melalui indikator dibawah ini :

a. Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU).

Untuk program bantuan Rutilahu di Desa Tanjung Lipat sendiri mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp. 15 Juta Per-KK yang dimana dana tersebut sudah termasuk kedalam pengadaan barang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian anatar laporan penanggung jawaban yang telah dibuat oleh pihak Desa Tanjung Lipat dengan kondisi yang sebenarnya yang ada dilapangan, dimana yang peneliti temukan salah satu penerima yang mendapat bantuan ini hanya mampu memperbaiki depan rumah nya saja namun tidak bagian dalam, dengan kondisi yang peneliti masih anggap tidak layak untuk ditinggali.

Dari hasil observasi langsung didapati adanya perubahan ukuran rumah dari yang awal hanya sebesar 4 x 5 Meter² berubah menjadi 7 x 8 Meter² yang dapat dikatakan bahwa semakin luas bangunan yang diperbaiki maka akan menambah Cost atau pengeluaran dalam memperbaiki hunian tersebut. Kemudian jika diteliti dari tujuan awal program bantuan dimana fokus program hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas bangunan / hunian saja bukan membangun ulang rumah penerima dan calon penerima. Namun pada kenyataannya, diketahui bahwa ada penerima bantuan yang bersifat membangun ulang rumah hunian bukan untuk merenovasi bagian yang dianggap rusak.

b. Bentuk kerjasama antara dinas terkait dengan pihak Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga

Dalam program RUTILAHU di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun adapun dinas-dinas yang menjalin kerjasama guna mensukseskan pelaksanaan program Rutilahu diantaranya ialah Dinas Sosial dan Ketua Unit Pengelola Tingkat Desa / Kelurahan (UPK) adalah Lurah / Kepala Desa

setempat yang diberi Honorarium sebesar Rp 150.000 selama 3 (tiga) bulan dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kelompok penerima bantuan dalam penyelesaian administrasi dan memverifikasi proposal yang diajukan masing-masing kelompok.
- b. Melakukan Verifikasi Proposal selain disesuaikan dengan data terpadu Penanganan Fikir Miskin dan orang tidak mampu juga melakukan pemeriksaan di lokasi.
- c. Melakukan pelaporan setaip pelaksanaan fisik maupun keuangan ke Kecamatan (minimal setiap satu bulan setelah pelaksanaan)
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- e. Membantu memverifikasi pertanggungjawaban keuangan dari kelompok penerima (maksimal 3 minggu setelah rehabilitasi selesai).

Sekretaris, Bedahara UPK dan Pendamping kegiatan RUTILAHU adalah orang yang ditunjuk oleh Lurah / Kepala Desa yang di beri Honorarium sebesar Rp 100.000, selama 3 (tiga) bulan dan mempunyai tugas :

- a. Memotivasi kelompok penerima sasaran untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di wilayahnya.
- b. Membantu kelompok penerima bantuan membuat rencana usulan / proposal kebutuhan perbaikan rumah.
- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan,
- d. Membantu membuat laporan fisik.
- e. Membantu membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

2. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

a. Proses penetapan pendamping calon penerima

Penetapan pendamping sebagai penanggung jawab calon penerima, bantuan ini dipilih atau ditunjuk langsung oleh tiap-tiap Desa yang ada di Kabupaten Lingga yang kemudian diusulkan ke Dinsosnaker yang akan diperkuat secara hukum dengan dikeluarkannya SK Penetapan Pendamping. proses penetapan Pendamping calon penerima tidak terlepas dari adanya kerja sama antara pihak Desa Tanjung Lipat yang didukung oleh Dinsosnaker Kabupaten Lingga itu sendiri, kemudian proses penetapan pendamping sendiri diambil dari kalangan masyarakat sekitar yang dianggap tahu mengenai kondisi masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tersebut, kemudian pemilihan masyarakat sebagai calon pendamping penerima dapat dipilih dari kalangan masyarakat biasa maupun dari aparat Desa.

b. Proses Pengusulan / Rekrutment serta penetapan calon penerima bantuan Rutilahu

Proses pengusulan ataupun perekrutan merupakan proses dimana calon penerima bantuan dipilih diantara masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, serta adanya klasifikasi dalam proses pengusulan calon penerima yang dilakukan oleh pendamping. Mekanisme dalam pelaksanaannya yaitu sebelum dilaksanakan pengusulan calon penerima, pendamping disertai dengan staff Desa Tanjung Lipat melakukan survei untuk mengetahui berapa jumlah yang layak mendapat bantuan dengan disertai kecocokan dengan data terpadu kegiatan sosial.

Kemudian, setelah survey yang dilakukan oleh pendamping dan staff Desa Tanjung Lipat dan pendamping telah memegang nama-nama calon penerima maka tahap selanjutnya yakni pengusulan ke Dinsosnaker Kabupaten Lingga, yang akan dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelayakan penerima apakah telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak.

Jika didalam pelaksanaannya ditemui calon penerima bantuan tersebut tidak layak atau tidak termasuk data terpadu kegiatan sosial untuk mendapatkan bantuan maka pihak dinsa akan meminta pendamping dan pihak Desa Tanjung Lipat untuk mencari pengantinya. Terdapat fenomena yang terjadi dilapangan, dimana penerima bantuan seharusnya tidak layak menerima bantuan jika dilihat dari fisik bangunan dan juga kriteria penerima dapat dikatakan tidak

layak mendapat bantuan karena memiliki hunian yang berbahan dasar batu dimana hal tersebut menyimpang dari kriteria calon penerima yang telah ditetapkan, hal ini yang kemudian menjadi masalah bagi masyarakat lainnya karena dirasa masih banyak masyarakat yang lebih layak untuk menerima dengan kondisi fisik bangunan yang lebih memperhatikan dibandingkan dengan penerima tersebut.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinsos melalui pendamping dan pihak Desa Tanjung Lipat maka akan dilakukan penetapan calon penerima bantuan dengan adanya SK Penerima bantuan yang berisikan nama-nama serta alamat penerima yang akan disebar oleh Disosnaker Kabupaten Lingga kepada Kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga. Dibantu oleh Beppeda Provinsi Riau yang akan menyebarkan SK penerima dengan skala Provinsi yang tidak hanya berisikan nama-nama penerima yang ada di Kabupaten Lingga namun pulau-pulau lain seperti Anambas, Natuna, Bintan, Tanjungpinang dan Batam untuk sekala Provinsi.

c. Proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga.

Dalam proses pelaksanaan bantuan ini mencakup pelaksanaan pemugaran atau proses renovasi rumah penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan adanya SK Penerima bantuan, yang kemudian akan dilakukan perbaikan rumah dengan menggunakan dana APBN dan akan dialokasikan kepada penerima sesuai dengan mekanisme yang telah dirancang di dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, didalam pelaksanaan pengerjaan perbaikan rumah mendapat dana bantuan sebesar Rp 15.000.000 yang berupa bahan bangunan, kemudian dalam pelaksanaannya setiap Rutilahu untuk setiap unit setelah diberikannya dana akan diberikan jangka waktu 120 hari kerja ataupun 4 bulan masa pengerjaan dan setelah pengerjaan rumah hampir selesai maka diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan rumah yang juga menjadi tugas dari pendamping penerima. Ditemukan adanya penerima yang mendapat bantuan untuk memperbaiki rumahnya dengan menggunakan tukang dan turut memperbaiki, bukan gotongroyong warga.

3. Evaluasi Keluaran (Output Evaluation)

Output ataupun keluaran langsung merupakan sebuah hasil dari proses telah berjalanya suatu program bantuan, yang akan langsung terlihat hasilnya setelah pelaksanaannya dikatakan 100%.

Adanya perubahan fisik bangunan menjadi lebih layak huni dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dengan adanya program bantuan Rutilahu telah mampu memberikan perubahan walaupun tidak signifikan tetapi menghasikan rumah yang layak huni baik dari segi fisik bangunan bagian dalam dan depan ruangan serta menjadi layak dan kokoh untuk ditempati.

4. Evaluasi Akibat / Pengaruh (Outcome Evaluation)

a. Adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat penerima

Dengan adanya program Rutilahu tidak dapat dikatakan mampu meningkatkan kondisi ekonomi ataupun merubah kondisi ekonomi masyarakat penerima, dikarenakan program bantuan Rutilahu hanya berbasis perbaikan hunian agar lebih layak huni dari sebelumnya, bukan bantuan yang termasuk kepada bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti halnya pengadaan dana bantuan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang ada.

b. Adanya perubahan lingkungan sekitar masyarakat penerima

Keadaan lingkungan masyarakat penerima menjadi lebih rapi dan juga memiliki bentuk bangunan fisik yang lebih layak dihuni dan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat penerima bantuan. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa dengan adanya program bantuan Rutilahu ini mampu merehabilitasi rumah masyarakat yang dapat dihasilkan manfaat programnya dalam bentuk keadaan lingkungan masyarakat penerima dan juga masyarakat yang ada disekitar penerima.

5. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation)

a. Dampak Positif

Yaitu dampak yang berpengaruh positif bagi kualitas hidup masyarakat miskin berupa peningkatan kualitas hidup keluarga miskin, hal ini dapat dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan kondisi psikologis. Dampak positif dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Bakung Serumpun, dalam hal ini berkaitan langsung dengan kondisi sosial yang dirasakan penerima sebelum dan setelah menerima bantuan RUTILAHU.

1). Kegiatan bersama anggota keluarga sebelum dan sesudah adanya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan layak atau tidak layaknya rumah keluarga yang berada didalam rumah pasti berkumpul, baik mau makan, bermain, tertawa dan sedih keluarga tetap berkumpul seperti keluarga lainnya.

2). Kegiatan sosial di lingkungan sebelum dan sesudah adanya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Dari hasil penelitian didapati bahwa tidak ada masalah yang di hadapi dari kegiatan sosial di lingkungan semua mengikuti itu sudah menjadi tradisi kampung. Sebelum atau sesudah program RUTILAHU untuk kegiatan sosial berjalan lancar tanpa masalah.

b. Dampak Langsung

Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung oleh keluarga penerima bantuan setelah atau sebelum Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Dampak langsung berkaitan dengan dampak positif yang dirasakan keluarga penerima bantuan Kondisi kesehatan baik sesudah atau sebelum program Rutilahu. kurang rumah yang layak membuat masyarakat mengalami sakit, karena kurangnya standar rumah yang baik karena kondisi rumah mereka masih bocor dan tidak memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara, kurangnya hidup sehat keluarga ini membuat satu-persatu keluarga mengalami sakit. Setelah adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah

Tidak Layak Huni (RUTILAHU) keluarga penerima tidak mengalami sakit lagi atau jarang mengalami sakit, dikarenakan kondisi rumah yang sudah baik dan bisa dikatakan rumah layak huni.

c. Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung yaitu dampak yang dirasakan tidak langsung oleh keluarga dan dilihat secara kasat mata namun dapat dirasakan oleh keluarga penerima bantuan RUTILAHU. Dampak tidak langsung ini dapat dilihat dalam aspek perilaku hidup bersih keluarga. Tanpa disadari keluarga penerima bantuan Rutilahu sudah meningkatkan perilaku hidup bersih di dalam keluarga mereka. Setelah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dapat diketahui perilaku hidup bersih keluarga mengalami peningkatan yang signifikan karena terlihat semakin banyaknya keluarga yang sudah meningkatkan kebersihan lingkungan mereka. Peningkatan ini juga berpengaruh pada kondisi kesehatan keluarganya yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

d. Kondisi Psikologis

Peningkatan pada kondisi psikologis dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan rasa aman dan rasa nyaman keluarga untuk tinggal dalam rumah mereka. Peningkatan rasa nyaman keluarga dapat dilihat dimana keluarga setelah memperoleh bantuan rumah sudah merasa sangat nyaman tinggal didalam rumahnya, berkumpul dan beraktifitas bersama anggota keluarganya di dalam rumah. Peningkatan rasa aman keluarga dapat dilihat bahwa sesudah RUTILAHU keluarga sudah merasa sangat aman tinggal didalam rumahnya tanpa harus khawatir dengan datangnya hujan dan hewan-hewan liar yang dapat masuk kedalam rumah, pencuri dan penyakit yang dapat mengancam keselamatan penghuni rumah.

Pada kondisi sosial, tidak ada peningkatan signifikan pada responden dapat dilihat frekuensi berkumpul keluarga dengan anggota keluarga sebelum dan sesudah RUTILAHU sudah dalam keadaan baik. Begitu juga dengan hubungan keluarga dengan lingkungan sebelum dan sesudah RUTILAHU sudah terbangun dengan baik. Contohnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti

kegiatan gotong royong dalam acara pernikahan dan pemuda di lingkungannya masih terjalin dengan baik.

Kesimpulan

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di desa tanjung lipat kabupaten lingga telah mencapai tujuan utamanya untuk memfasilitasi masyarakat miskin akan kebutuhan rumah yang layak huni, walaupun masih belum maksimal dirasakan masyarakat penerima Desa Tanjung Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) ini hanya berdampak atau menghasilkan hunian rumah yang lebih layak namun tidak berdampak kepada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Saran

1. Untuk aparat Desa Tanjung Lipat agar mampu memilih calon pendamping yang dapat berkerja dengan SOP yang berlaku dan juga mampu menyesuaikan dengan juklak yang ada, agar tidak jadi penyimpangan didalam proses pelaksanaan program yang merugikan pihak penerima bantuan.
2. Monitoring maupun pengawasan didalam pelaksanaan tugas pendamping yang juga harus dilakukan oleh pihak Desa Tanjung Lipat yang bertanggung jawab kepada masyarakat penerima dan juga Dinsosnaker Kabupaten Lingga.
3. Perlu kerjasama yang solid antara pihak Desa Tanjung Lipat dan pendamping didalam calon penerima agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelum dilakukan ketahap pengajuan nama calon penerima ke Dinsosnaker Kabupaten Lingga.

Daftar Pustaka

Adi Fajar, Nugraha, 2014, Skripsi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Sarang 2014.

<https://www.google.com/ur?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.fisifuntirta.ac.id/656/1/IMPLEMENTASI%2520POGRAM%2520REHABILITASI%2520SOSIAL>

[%2520RUMAH%2520TIDAK%2520LAYAK%2520HUNI%2520%2528RS-RTLH%2529%2520-Copy.pdf% ved=2ahUKEwj8ivD_yqDoAHUVT30KHUz3DJEQFjABegQIBxAL% usg=AOvVaw08Bk9uTUijd23N-GpalJi&cshid=1584416430498.](#)

Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Capi. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan :Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*, Jakarta : PT . Bumi Aksara

Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy, New Jersey* : Upper Saddle River

Meltesa, Rapita. 2019, Skripsi, Ektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan 2019. Di Downlod pada Tanggal 08 maret 2020.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.iainbengkulu.ac.id/3551/1/MELTTESA%250RAPITA.pdf&ved=2ahUKEwj83LW8yKDoAHXWfH0KHS3IBYwQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw3aVcUaw3aVcUgKUysy2vcrLXPD2pp>.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia

RINAH, S. A. (2020). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Bina Keluarga Balita di RW X Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur). *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 2(1), 314-329.

Santosa, Pandji. 2009. *Analisis Kebijakan Publik –Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama

Sarimah, 2016, Skripsi, *Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2016*. Di Download pada tanggal 09 maret 2020.
https://www.google.com/ur?sa=t&source=web&rct=http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/03/jurnal-sarimah.pdf&ved=2ahUKEwj475jgwaDoAHXHfH0KHW2QTcQFJAAegQIARAB&usg=AOvVaw2xvaF2PjpEaeLN_35ICaxK

Tayibnapi Yusuf, Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta : Medi Press

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : PT. Buku kita

Wirawan, 2011. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada